

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PENELANTARAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi  
Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**FITRI DIANA**

**NPM : 1621020211**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PENELANTARAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi  
Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**FITRI DIANA**

**NPM : 1621020211**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Pembimbing II : Frenki, M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk ke dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014? serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan pada anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian lapangan (*field reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai pandangan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Pelaksanaan perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena telah melakukan upaya-upaya demi mewujudkan perlindungan terhadap anak terlantar yaitu melakukan pendataan anak terlantar, memberikan sembako untuk meningkatkan gizi anak terlantar, memberikan pelayanan sosial anak terlantar dengan menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan melakukan pendampingan sosial terhadap anak terlantar. *Kedua*, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk perlindungan terhadap anak terlantar menurut perspektif hukum Islam telah sesuai dengan *hadhana* atau pemeliharaan anak dalam syari'at Islam dan termasuk dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Karena Dinas Sosial telah melakukan upaya untuk menanggulangi anak terlantar di Kabupaten Pesisir Barat.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Diana  
NPM : 1621020211  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29-Juni-2020  
Penulis,

  
**Fitri Diana**  
1621020211





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam  
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat  
dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak  
Terlantar)**

**Nama : Fitri Diana**

**NPM : 1621020211**

**Jurusan : Siyasah Syar'iyah**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**

**Pembimbing II**

**Frenki, M. Si.**

**NIP. 198003152009011017**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**

**Frenki, M. Si.**

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)”, disusun oleh, Fitri Diana, NPM: 1621020211, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis, 3 September 2020**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.**

**Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Penguji III : Frenki, M.Si.**

**Dekan**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**160920221993031002**



## MOTTO

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ  
فَأَحْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(Q.S. Al-Baqarah:220).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

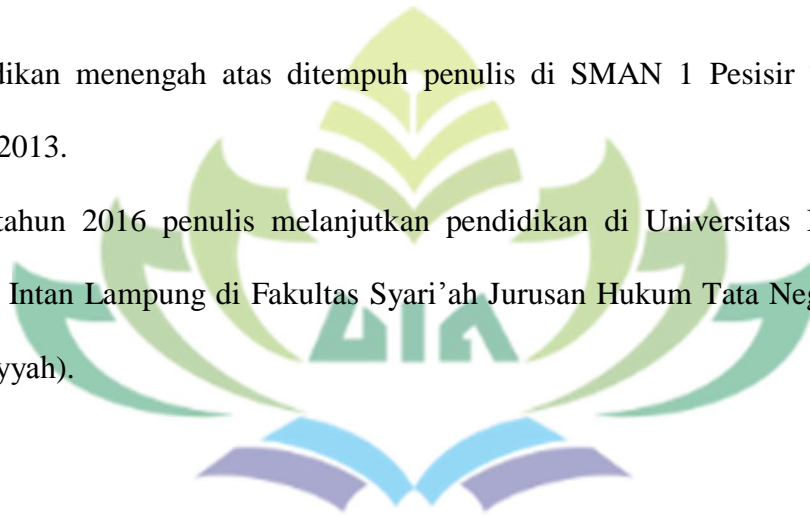
1. Ayah dan Ibu tercinta, M. Khoirul Amri dan Maryati, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Adik-adikku tersayang, Eliza, Pramita Sari, Desi Diana Putri, dan Muhammad Rizki Ramdo yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Nenek dan Kakekku tercinta, Asiah dan M. Sumardi yang selalu menyayangi penulis dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.



## **RIWAYAT HIDUP**

**Fitri Diana**, lahir pada tanggal 18 April 1998 di Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Anak dari pasangan Bapak M. Khoirul Amri dan Ibu Maryati. Beralamat di Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN Kebuayan pada tahun 2004.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 20 Krui pada tahun 2010.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMAN 1 Pesisir Tengah pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah).



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Frenki, M.Si. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.



6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman seperjuangan semasa kuliah yaitu Sefty Wulandari, Via Susanti, Mareta Budia, Eni Marlina, Revi Puja Sari, Dicky Nuari, Mega Setiawan, Eka Shaputra Jaya, Mahfiro, Wiwin Ayu Lestari, Devi Agesti, teman-teman kelas D angkatan 2016 jurusan siyasah syar'iyah, dan teman-teman KKN Kelompok 87 di Desa Sukaraja Tiga Kec. Margatiga, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 29-Juni-2020

Fitri Diana  
1621020211

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9

## BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan Anak Terlantar.....	15
B. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam.....	20
C. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	25
D. Tinjauan Pustaka.....	35

## BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN



A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.....	40
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan terhadap Anak Terlantar .....	45
C. Hambatan dalam Memberi Perlindungan terhadap Anak Terlantar oleh Dinas Sosial .....	55

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun .....	58
B. Perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial dalam Memberi Perlindungan terhadap Anak Terlantar.....	64

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Dokumentasi.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Blangko Konsultasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumen Pendukung (foto)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman makna. Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

Implementasi, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah diunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.<sup>1</sup>

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Penelantaran anak yaitu karena keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 529.

<sup>2</sup>Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), h. 3.



akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.<sup>3</sup>

Perspektif yaitu cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya.<sup>4</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Selain itu, hukum Islam adalah ilmu yang menerangkan segala hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang digali dari dalil-dalil terperinci.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa maksud dari “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)” adalah meneliti tentang penelantaran anak perspektif hukum Islam yang akan dilakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Setiap manusia mempunyai Hak Asasi Manusia yang telah di undangkan oleh negara kepada warga negaranya, berarti seorang manusia mempunyai hak asasi sejak dilahirkan, begitu pula dengan anak yang tentunya mempunyai hak

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 309.

<sup>4</sup>Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2005), h. 336.

<sup>5</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang terjadi pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat yaitu masih banyak anak yang terlantar karena orang tua yang tidak bertanggungjawab.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- b. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari yaitu di program studi Siyasah Syar'iyah.

## C. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>6</sup>

Potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan terdapat pada anak dan memiliki ciri khusus. Maksud dari ke khususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia yang akan dihadapi. Maka dari itu, anak

---

<sup>6</sup>Zakarya Ahmad, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), h. 327.

patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang. Perkembangan akan kebutuhan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih akan hak-hak anak karena dibahu merekalah masa depan bersanding.

Perwujudan generasi muda yang berkualitas berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak dan hak yang dimiliki oleh anak, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan dilingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak memiliki hak asasinya tersendiri dari sejak dia dilahirkan, Salah satu hak anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.<sup>7</sup> Perlindungan yang dimaksud ialah hak yang melekat pada diri anak sejak awal ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Konvensi hak anak menyebutkan ada 4 (empat) pokok yang dimiliki oleh seorang anak yang harus dilindungi yaitu hak

---

<sup>7</sup>Bismar Siregar, *Hukum dan Hak Asasi Anak-Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 40.



untuk hidup (*survival*), hak berkembang (*development*), hak mendapat perlindungan (*protection*), dan hak berpartisipasi (*participation*).<sup>8</sup>

Namun, selain hak anak tadi ada hak anak yang seringkali diabaikan oleh orang tua, terutama oleh ayah nya yaitu hak kasih sayang dan hak asuh terhadap anak atau yang sering disebut dengan penelantaran. Selain terabaikan kasih sayang dan hak asuh terhadap anak, penelantaran yang dimaksud dalam pengertian ini ialah tidak terpenuhinya hak-hak utama terhadap anak, seperti hak nafkah (sandang, pangan dan papan) dan juga hak dalam berpendidikan. Namun, kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan cenderung mendapatkan perlakuan kasar serta disia-siakan oleh orang dewasa atau orang tuanya. Penelantaran terhadap anak termasuk dalam lingkup kriminologi karena termasuk tindak kejahatan, kriminologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.<sup>9</sup>

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan

---

<sup>8</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 2015), h. 176.

<sup>9</sup>Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi: Suatu Pengantar* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2015), h. 3.

sosial.<sup>10</sup> Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya disebutkan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Al-Qur'an banyak sekali mencantumkan ayat-ayat yang mengatur tentang larangan-larangan yang harus diatuhi dan ditinggalkan oleh seorang hamba Allah. Larang yang diatur dalam Al-Quran tersebut pada hakekatnya tiada lain adalah larangan untuk berbuat dzalim. Karena sesungguhnya perbuatan yang dilarang oleh Allah swt tersebut seluruhnya adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan perbuatan yang dzalim yang diharamkan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Beberapa larangan yang diterapkan oleh Allah AWT dalam Al-Qur'an bagi hamba-hambanya antara lain yang menyebutkan larang untuk menyakiti orang lain yaitu sebagaimana firman Allah.

Qur'an surah al-Ahzab ayat 58 :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَنًا

وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

---

<sup>10</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Retrika Aditama, 2008), h. 33.

*“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”*. (QS. Al-Ahzab: 58).<sup>11</sup>

Melihat kasus ini, maka negara perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kekerasan atau penelantaran anak yang sekarang sering terjadi dimana-mana . Karena penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk ke dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik dan optimis untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)”.

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak lebih berfokus pada Pasal 59 Ayat 2 tentang perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang huruf m yang berisi tentang anak korban perlakuan salah dan penelantaran serta

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syhama Examedia Arkanleema, 2009), h. 426.

bagaimana peran dinas sosial dalam mensejahterakan permasalahan-permasalahan dalam penelantaran anak dilihat dari perspektif hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat?

#### **F. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan pada anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- 2 Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.

#### **G. Signifikasi Peneltian**

- 1 Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi atau bahan untuk diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk yang berkaitan dalam hukum Islam.



- 2 Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.<sup>12</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>13</sup> Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang

---

<sup>12</sup>Joko Subbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994), h. 2.

<sup>13</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang berlangsung.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>15</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.

### b. Sumber Data Sekunder

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 16.

<sup>15</sup>Suharsimi Arit kumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakara: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, yang terdiri dari manusia, benda dan peristiwa sumber data yang mempunyai karakteristik dalam sebuah penelitian.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dan anak-anak terlantar di Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Sampel

Sampel adalah contoh, refresentasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.<sup>17</sup> Tujuan peneliti mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Proposive Sampling* yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Maka agar penelitian tersebut benar-benar bisa

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 130.

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 148.

mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Kriteria yang bisa dijadikan sample penelitian ini terdiri dari 5 orang yaitu, Kepala Dinas sosial, Sekertaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dan 2 orang anak terlantar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 202.



## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>19</sup>

## 6. Metode Analisis Data

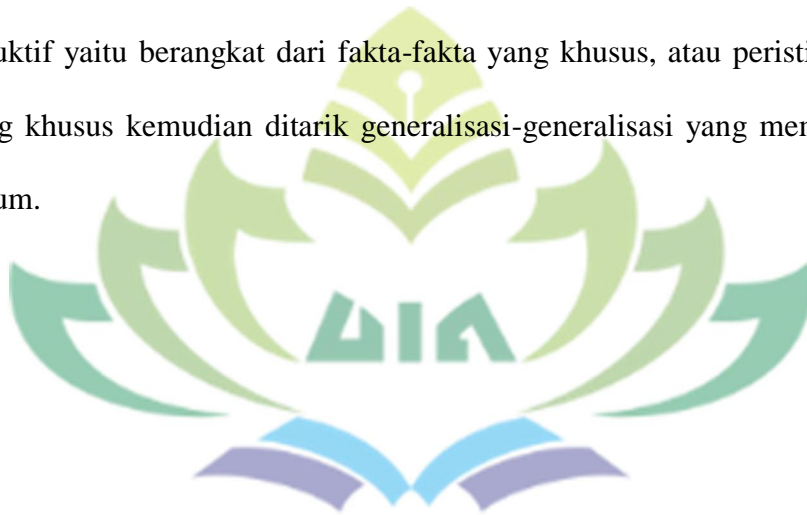
Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk

---

<sup>19</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 120.

keterangan-keterangan saja.<sup>20</sup> Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>21</sup>

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.



---

<sup>20</sup>Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h.78.

<sup>21</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 34.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perlindungan Anak Terlantar**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>22</sup> Itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian.<sup>23</sup> Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang

---

<sup>22</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 15.

<sup>23</sup>MG. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), h. 7.

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>24</sup>

Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.<sup>25</sup> Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>26</sup> Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.<sup>27</sup> Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 1.

<sup>25</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 5.

<sup>26</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

<sup>27</sup>Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.



Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orangtua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orangtua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.<sup>29</sup>

Penelantaran terhadap anak adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang seharusnya dapat terpenuhi agar anak tumbuh dengan baik sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Ferri menyatakan bahwa setiap kejahatan merupakan hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.<sup>30</sup>

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-

---

<sup>29</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 226-227.

<sup>30</sup>Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi*..., h. 63.

hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Hak-hak anak sangatlah banyak, sepadan dengan hak penjagaan (perlindungan) untuk dirinya.<sup>31</sup>

Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>32</sup>

Peningkatan kualitas hidup manusia dalam pembangunan nasional suatu negara yaitu bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan terhadap rakyatnya terutama perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, hukum merupakan

---

<sup>31</sup>Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya* (Jakarta Timur: Istanbul, 2016), h. 183.

<sup>32</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak....*, h. 62.

jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.<sup>33</sup>

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum *civil*.
2. Perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.<sup>34</sup>

Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>35</sup> Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>34</sup>Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 21.

<sup>35</sup>Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 35.

- c. Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan.
- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>36</sup>

## **B. Perlindungan Anak Terlantar menurut Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup dalam masyarakat mempunyai berbagai hubungan.<sup>37</sup>

Islam sebagai agama universal, sangatlah menghendaki anak-anak dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakikat

---

<sup>36</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), h. 4-6.

<sup>37</sup>Juhaya S. Praja, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 62.



anak sebagai rahmat yang diberikan Allah swt kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar. Oleh karena itu, seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan rasa penjagaan, cinta kasih, dan keikhlasan.<sup>38</sup>

Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran ketika usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, ketika orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.<sup>39</sup> Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.<sup>40</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلٍ ﴿٤٦﴾

---

<sup>38</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015), h. 99.

<sup>39</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 5.

<sup>40</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 1.

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*  
(Q.S AL-Kahfi:46).

Hukum Islam menyebut pemeliharaan anak dengan *hadhana*. *Hadhana* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Ulama fiqh mendefenisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik, jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>41</sup>

Arti yang lebih luas dari *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya hubungan perkawinan. Pemeliharaan atau perlindungan terhadap anak merupakan hak anak. Maulana Hasan Wadang menerangkan bahwa hak asasi anak dalam pandangan hukum Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sebagai berikut:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian dan keturunannya.
3. Hak anak dalam penerimaan nama baik.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 114.

4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam memiliki harta benda, hak waris, demi kelangsungan hidup yang bersangkutan.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>42</sup>

Anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, dan melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir batin. Keberpihakan Islam bukan sebatas pada aktivitas yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan kaum *dhuafa* termasuk anak terlantar, melainkan bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

Allah swt memberikan peringatan kepada para orangtua agar tidak meninggalkan ataupun menelantarkan anak-anak mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 9:

---

<sup>42</sup>Maulana Hasan Wadang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grassindo, 2000), h. 32.

<sup>43</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Cipta Karya, 2000), h. 16.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.  
 (Q.S. An-Nisa’: 9).

Sebagaimana dalam ayat di atas, Islam sangat memperhatikan perlindungan anak bahkan semenjak anak masih dalam kandungan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya ”.  
 (H.R. Bukhari, Muslim).<sup>44</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin, karena memikul tanggung jawab. Tanggung jawab yang

<sup>44</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), no. 4789.

dimaksud di sini adalah upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap anak terlantar dalam Islam merupakan tanggung jawab pemimpin karena seorang pemimpin harus mensejahterakan rakyat. Perlindungan terhadap anak terlantar tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemimpin saja, melainkan keluarga dan masyarakat juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar.

### **C. Perlindungan Anak Terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut yaitu:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.



Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya:

1. Masa dalam kandungan.
2. Masa prasekolah.
3. Masa sekolah.
4. Masa pubertas.
5. Masa adolesens.

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosial. Oleh sebab itu antara hak dan

---

<sup>45</sup>Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 143-146.

kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan. Perlindungan anak dapat berjalan bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.<sup>46</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>47</sup>

Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.<sup>48</sup> Begitu pula Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

---

<sup>46</sup>Mumi Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi* (Jakarta: Simposium BPHN Depkeh, 1984), h. 56.

<sup>47</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>48</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan.
6. Perlakuan salah lainnya.<sup>49</sup>

Sedangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>50</sup>

Orangtua memiliki kewajiban terhadap anak untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>51</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

---

<sup>49</sup>Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>50</sup>Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>51</sup>Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.<sup>52</sup>

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.<sup>53</sup> Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>54</sup>

Sedangkan mengenai Pengertian perlindungan anak diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>55</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk

---

<sup>52</sup>Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>53</sup>Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>54</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>55</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.<sup>56</sup>

Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak faktor utamanya disebabkan karena kemiskinan, faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua kandung. Terdapat kenyataan yang kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan seperti penelantaran anak dapat dikatakan tidak manusiawi terhadap anak, tanpa dapat melindungi dirinya, tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.<sup>57</sup>

Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), di mana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif. Maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa.

Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan prilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi. Dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan

---

<sup>57</sup>Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Utama, 2005), h. 5.

hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.<sup>58</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>59</sup>

Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disebutkan di atas, dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin, dan juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menentukan

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>60</sup>

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik. Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni Pasal 1 ayat (6) bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>61</sup>Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat terancam. Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orangtua kandung terhadap anaknya, jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76 huruf a dan b menyebutkan bahwa :

1. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.<sup>62</sup>

Pasal 77 huruf b tentang Ketentuan Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana

---

<sup>62</sup>Pasal 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>63</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Qurrata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Ekonomi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kota Malang)”. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di kota Malang yang sedang melakukan suatu program kota layak anak serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Shofia Fatmawati dalam Jurnal Hukum Diponegoro Edisi 3, Volume 5, Tahun 2016 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Diperkerjakan Sebagai Buruh Perusahaan” dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan dalam hukum positif dan kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh

---

<sup>63</sup>Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



perusahaan. Penelitian tersebut menghasilkan kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan buruh anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan yang dilakukan pada hukum positif masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memberi sanksi pidana pada setiap orang yang melanggar ketentuan pada Undang-undang tersebut, dan melakukan kebijakan hukum pidana mengenai anak yang dipekerjakan di perusahaan pada masa yang akan datang agar sesuai dengan perkembangan zaman. Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis lebih fokus menyoroti hal-hal terkait terletak pada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi, dinas yang bersangkutan dinas sosial Kota Semarang, dengan demikian jika dikaitkan kembali dengan Perlindungan Hukum terhadap tindak kekerasan anak : studi tentang anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Kota Semarang, maka penelitian ini harus menilai sejauhmana pengawasan pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Mustika Nurwijayanti dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 1, Tahun 2012 yang berjudul “Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di daerah Yogyakarta” dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah apakah yang menjadi faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta, apakah tindak pidana yang dilakukan anak jalanan dan apakah

bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan dan bagaimanakah penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan di Yogyakarta adalah karena adanya anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, pekerja migran bermasalah sosial dan keluarga fakir miskin. Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di Yogyakarta antara lain memalak, memeras, dan melakukan ancaman kepada korban. Dalam hal ini penanganan yang diperlukan untuk anak jalanan tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut ke dalam lembaga atau rumah singgah untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta adalah dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan pendampingan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Qurrata tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Ekonomi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kota Malang)” yaitu sama-sama

membahas mengenai perlindungan terhadap anak jalanan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yakni dalam penelitiannya, Syarifah berfokus pada faktor-faktor penyebab eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini berfokus pada perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Shofia Fatmawati dalam Jurnal Hukum Diponegoro Edisi 3, Volume 5, Tahun 2016 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Diperkerjakan Sebagai Buruh Perusahaan” yaitu sama-sama mengkaji mengenai perlindungan terhadap anak. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu dalam jurnal tersebut fokus penelitian Shofia adalah kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan dalam hukum positif dan kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh perusahaan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Mustika Nurwijayanti dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 1, Tahun 2012 yang berjudul “Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum

Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di daerah Yogyakarta” adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Andriyani yaitu terletak pada fokus penelitiannya, dalam jurnal tersebut fokus penelitian Andriyani adalah faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Cipta Karya, 2000.
- Anwar, Dessy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinneka cipta, 1998.
- Azhim, Said Abdul. *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*, Jakarta Timur: Istanbul, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008.
- Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989.



Gultum, Maidin. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam System Peradilan Agama Anak Indonesia*, Bandung: Retrika Aditama, 2008.

Kanang, Abdul Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.  
Krisnawati, Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utama, 2005.

Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian*, Bandar Lampung: PT Citra Aditia Bakti, 2001.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nur, Efa Rodiah. *Buku Daras Kriminologi: Suatu Pengantar*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2015.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

S. Praja, Juhaya. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2019.

Siregar, Bismar. *Hukum Dan Hak Asasi*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Sumiarni, MG. Endang dan Chandra Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Suvbagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praraktik*, Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1994.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Teguh, Harry Pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018.

Tukiman, Mumi. *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi*, Jakarta: Simposium BPHN Depkeh, 1984.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015.

Wadang, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grassindo, 2000.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017.

## **C. Wawancara**

Agus Triyadi, Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, Pesisir Barat, 20 April 2020.

Ahmadi, Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, Pesisir Barat, 20 April 2020.

Baijuri, Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, Pesisir Barat, 20 April 2020.

Edo Pernando, Wawancara dengan Anak Terlantar, Pekon Pagar Bukit, Pesisir Barat, 20 April 2020.

Yatina, Wawancara dengan Anak Terlantar, Pekon Pagar Bukit, Pesisir Barat, 20 April 2020.

